

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat (Sun'an & Senuk, 2015:59). Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya lokalnya secara mandiri, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Sjafrizal, 2018:201).

Salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antara pemerintah daerah dengan pembangunan adalah dari aspek pengelolaan keuangan. Daerah perlu melakukan penilaian dalam pengelolaan pemerintahan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilakukan dengan menilai kinerjanya (Kuncoro, 2014:3).

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa kinerja sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan melakukan penilaian kinerja melalui

indikator yang tepat, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kemampuan daerah dalam penggunaan anggaran, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hal ini akan memastikan bahwa program kerja pemerintah daerah tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Tidak dapat disangkal bahwa otonomi daerah tidak akan dapat dilaksanakan secara baik tanpa didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai (Sjafrizal, 2018:376).

Namun, adanya gejala dimana Indonesia memiliki keberagaman kondisi ekonomi dan letak geografis yang berpotensi mempengaruhi praktik otonomi dan desentralisasi dalam menciptakan dampak yang berbeda di tiap daerahnya. Untuk mengetahui tingkat kemandirian pemerintah daerah pada 38 Provinsi di Indonesia dengan melihat data keuangan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :





Sumber : DJPK Kemenkeu yang diolah, 2024

Gambar 1.1
Rasio Desentralisasi Fiskal Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Grafik di atas menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian pemerintah daerah di seluruh Indonesia, 7 dari 38 provinsi memiliki kemampuan keuangan yang sangat kurang, 13 provinsi memiliki kemampuan keuangan yang kurang, 10 provinsi memiliki kategori cukup, 5 provinsi memiliki kemampuan yang sedang, 2 provinsi memiliki kemampuan baik, dan hanya 1 dari 38 provinsi yang memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik. Tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat rasio kemandirian mencapai 74% dan Provinsi Banten mencapai 50%.

Kondisi kemandirian keuangan daerah di Indonesia tersebut menunjukkan terjadinya fenomena disparitas yang disebabkan beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Provinsi Banten berhasil memanfaatkan sumber daya lokal dengan baik, menghasilkan pendapatan asli daerah yang signifikan dan meningkatkan kemandirian keuangannya. Sebaliknya,

daerah – daerah lain seperti Papua Pengunungan dan Papua Barat Daya, masih menghadapi tantangan besar dalam menggali potensi pendapatan asli daerah mereka yang menyebabkan ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai program – program pembangunan.

Dalam penelitian ini, menggunakan Provinsi Banten sebagai subjek penelitian, dimana Provinsi Banten merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, tetapi sudah bisa mencapai kemandirian dan menggali potensi yang ada. Namun, Provinsi Banten ternyata memiliki kesenjangan yang sangat tinggi antar daerahnya. Berikut disajikan grafik rasio kemandirian di pemerintah daerah di Provinsi Banten:



Sumber : DJPK Kemenkeu yang diolah, 2024

Gambar 1.2
Rasio Desentralisasi Fiskal di Kota/Kabupaten pada Provinsi Banten
Tahun 2023

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah di kota/kabupaten di Provinsi Banten tahun 2023 tidak merata, dengan perbedaan yang jelas antara daerah yang sudah mandiri dan yang belum mandiri. Dari gambar tersebut, Kota Tangerang memiliki kemandirian tertinggi yaitu 55%, sementara Kabupaten Pandeglang memiliki rasio terendah yaitu 8%. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Provinsi Banten di tahun 2023, hanya terdapat 4 daerah yang memiliki rasio di atas kategori sedang dan menunjukkan tren peningkatan, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Cilegon.

Penyebab umum terjadinya disparitas antardaerah diantaranya karena perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah, dan alokasi dana pembangunan antardaerah (Sjafrizal, 2018:119).

Di sisi lain, ketidakmandirian yang terjadi di pemerintah daerah di Indonesia disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang belum merata antara Jawa dan luar Jawa. Menurut Theodora (2023) dalam berita yang diterbitkannya, “Ini kembali ke masalah sumber ekonomi. Memang pembangunan infrastruktur sudah gencar, tetapi kapasitas daerah menghasilkan ekonomi bernilai tambah masih kurang”.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat fokus pada penguatan ekonomi daerah melalui desentralisasi dan

otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak pemerintah daerah berupaya keras mengkaji ulang sistem untuk menunjukkan bahwa biaya melakukan kegiatan usaha di daerah mereka mencerminkan keinginan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Kuncoro, 2014:87).

Menurut Wahyuadianto et al. (2020:1) selama pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah pusat menggunakan slogan “Trilogi Pembangunan”, yang merupakan filosofi pelaksanaan pembangunan terdiri dari stabilitas nasional, pembangunan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Namun, setelah hampir dua dekade penerapan desentralisasi di Indonesia pasca orde baru, permasalahan pertumbuhan ekonomi masih saja belum merata antar tiap – tiap daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024 (data diolah)

Gambar 1.5
Pertumbuhan Ekonomi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Banten
pada Tahun 2023

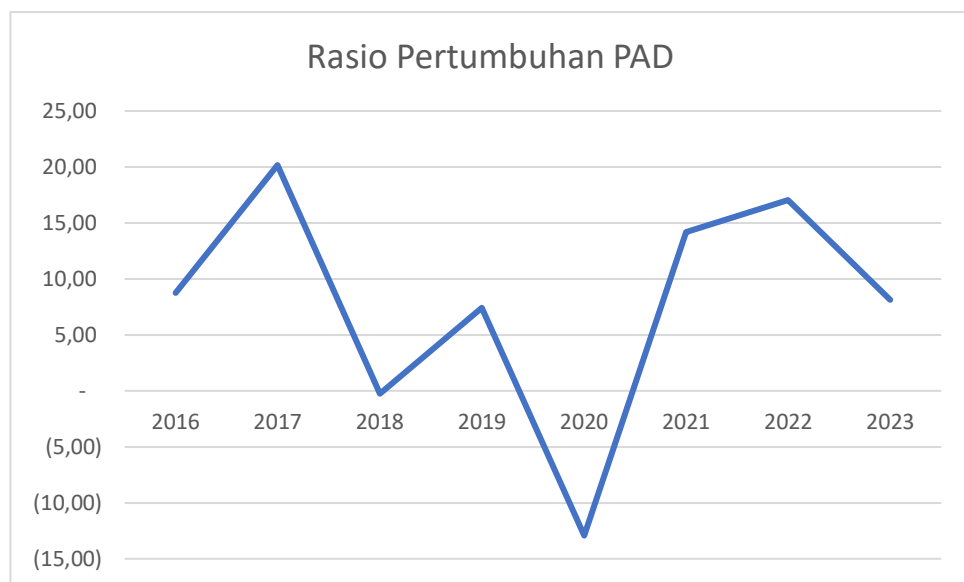
Gambar di atas adalah data pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Pada Tahun 2023, yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Fenomena ketidakmerataan ini menimbulkan masalah kesenjangan, hal ini muncul diduga karena terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada daerah tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah di mana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat (Sjafrizal, 2018:138-139).

Menurut Kuncoro (2014:49) kemandirian dapat diukur dengan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan yang diterima daerah. Dalam penelitian ini, pendapatan asli daerah tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan, namun juga sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kemandirian keuangan. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, daerah memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk merencanakan dan membiayai program – program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang

menegaskan bahwa dalam desentralisasi, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pendapatan. Dalam kasus di Indonesia, kemampuan keuangan daerah diukur dengan pendapatan asli daerah. Berikut ini adalah data pertumbuhan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten dari tahun 2016 – 2023 :



Sumber : DJPK Kemenkeu diolah, 2024

Gambar 1.3
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten
Tahun 2016 – 2023

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Fenomena pertumbuhan pendapatan asli daerah yang fluktuatif ini dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan kemandirian di Provinsi tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tolosang (2018) Tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah; Karouw et al., (2022) Tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah; dan Puspita Laoli et al.,(2020) Tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah; yang menyatakan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini berbanding terbalik dengan teori yang ada dan harapan peneliti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Bagaimana penciptaan aspek kemandirian keuangan daerah sekaligus prospek ekonomi di Provinsi Banten menjadi hal yang sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Maka dari itu, penelitian ini kemudian mencoba melihat analisis kemandirian keuangan daerah yang diwakili oleh indikator rasio pad terhadap total pendapatan daerah yang kemudian ditelaah keterkaitannya dengan variabel makroekonomi dan pendapatan daerah melalui indikator *growth* (pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pad).

Berdasarkan latar belakang yang memuat fenomena yang terjadi, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada**

Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten Periode Tahun 2016 – 2023)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menjabarkan identifikasi masalah yang merupakan gambaran lingkup penelitian adalah :

1. Bagaimana Petumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016 - 2023?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016 - 2023?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016 - 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016 - 2023.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016 - 2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016 - 2023.

1. 4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis / Peneliti

Selain untuk memenuhi persyaratan kelulusan serta menyelesaikan tugas akhir, penelitian ini juga memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis khususnya dalam mempelajari lebih dalam mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah khususnya yang berada di Kota/Kabupaten Provinsi Banten yang sebenarnya. Sehingga penulit dapat memperoleh Gambaran yang lebih jelas tentang kesesuaian aturan dan fakta di lapangan.

2. Bagi instansi Kota/Kabupaten Provinsi Banten

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan Keputusan bagi pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat dalam upaya untuk pengoptimalan kinerja keuangannya.

3. Bagi Lembaga Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti dengan topik yang sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan menambah pembendaharaan perpustakaan dan menunjang proses perkuliahan.

4. Bagi Pihak Lain

Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi serta pembanding bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang sama.

1. 5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. 5. 1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten periode tahun 2016 - 2023, dengan mengambil dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber secara sekunder dengan perantara media internet yakni dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan Banten yang menyajikan data valid mengenai perekonomian Indonesia.

1. 5. 2 Jadwal Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan dari bulan Oktober 2024 hingga bulan Maret 2025. (Lampiran 1)